

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN KETAATAN PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KABUPATEN MINAHASA SELATAN)**

*THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEMS AND THE ADHERENCE OF THE LAW REGULATIONS ON THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT INSTITUTION (SOUTH MINAHASA DISTRICT)*

Oleh:

**Agnestasia Laura Lumenta<sup>1</sup>**

**Jenny Morasa<sup>2</sup>**

**Lidia Mawikere<sup>3</sup>**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi**

**Email:**

[1lauraagnes0208@yahoo.com](mailto:lauraagnes0208@yahoo.com)

[2jennymorasa@hotmail.com](mailto:jennymorasa@hotmail.com)

[3lidiyamawikere78@gmail.com](mailto:lidiyamawikere78@gmail.com)

**Abstrak** : Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang baik serta seperangkat peraturan perundang-undangan telah digulirkan, salah satunya adalah Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan (AKIP), ini merupakan dalam suatu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna , berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 instansi pemerintah pada Kabupaten Minahasa Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu penyebaran kuesioner terhadap 35 orang responden. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian ini: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Ketaatan Peraturan Perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara simultan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Kata Kunci** : *Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

**Abstract** : *Community demands was strengthening for the implementation of public accountability by government, even central and local government. In this regard, the creation of public accountability must be implemented in government accounting in order to create good governance. With this connection needed the Regional Government Accounting System as well as of laws and regulations have been introduced, one of which is the Presidential Instruction No.7 of 1999 dated 15 June 1999 about Government Performance Accountability Agencies (AKIP), this is in an effort to improving the implementation of the government more efficient, effective, clean and responsible. The purpose of this study was to determine the effect of the Local Government Accounting System and Obedience Laws Against Government Performance Accountability in South Minahasa regency. The population in this study are all government agencies in South Minahasa regency. Data was collecting by using primary data which distributing questionnaires to 35 respondents. This study uses Multiple Linear Regression Analysis. The results of this study: Local Government Accounting System was partially significant which effect on the performance accountability of Government intitution, while The Adherence of Laws partially did not significant on the Performance Accountability of Government Intituition and simultaneously Accounting System of Local Government and the adherence of the law affect the Performance Accountability of Government intitution.*

**Keywords**: *Accounting System of Local Government, The Adherence of The Law, Performance Accountability of Government Institution.*

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Fatmala, 2014).

Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas public harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. Sehubungan dengan hal tersebut seperangkat peraturan perundang-undangan telah digulirkan, salah satunya adalah Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan (AKIP), ini merupakan dalam satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab (Rofika & Ardianto, 2014).

Semenjak Kabupaten Minahasa Selatan resmi menjadi daerah otonom pada Tahun 2003 silam, setiap kali pemeriksaan BPK, kabupaten yang berada di bagian Selatan tanah Toar Lumimuut ini selalu meraih prestasi Disclaimer of Opinion (TMP) sejak tahun 2004-2012 dan di tahun 2013 Kabupaten Minahasa Selatan memperbaiki citra walau hanya mengantongi opini Tidak Wajar (TW) dari BPK. Namun pada tahun 2014 kabupaten Minahasa Selatan berhasil mengukir sejarah baru dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam sistem pengelolaan keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi utara (<http://suarasulutnews.co.id/2015/06/13-tahun-raih-disclaimer-dan-tw-tetty-ukir-sejarah-baru-diminsel/>).

Berikut tabel yang menggambarkan perkembangan opini BPK terhadap Kabupaten Minahasa Selatan dari Tahun 2012-2014:

Tabel 1.1. Perkembangan Opini BPK atas LKPD tahun 2012 – 2014

NO	Nama Pemda	Opini BPK					
		2012		2013		2014	
1	Kab. Minahasa Selatan	TMP	Tetap	TW	Naik	WDP	Naik

Hal ini membuktikan Kabupaten Minahasa Selatan mengalami perkembangan. Ada beberapa hal yang menjadi parameter keberhasilan Pemkab Minsel menyangkut status WDP, meliputi Sistem pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan, serta Laporan Keuangan dan Asset. Diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar meningkatkan kinerjanya agar kedepan Minahasa selatan bisa meraih opini WTP dari BPK (<http://www.manadoterkini.com/2015/06/11456/sejarah-minsel-raih-opini-wdp-setelah-bertahun-tahun-sandang-disclamer/>).

**Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Akuntansi

Mahmudi (2011:92) dalam *Accounting Principles Board (APB) No. 4* Menyatakan bahwa : “ Akuntansi adalah aktivitas jasa , dimana fungsinya adalah memberikan informasi yang kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi(dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif)”. Akuntansi pada dasarnya menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi (Pontoh, 2013:2).

### Akuntansi Sektor Publik

Sujarweni (2015:1) menyatakan Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

### Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2011:223).

### Ketaatan Peraturan Perundangan

Peraturan yang mengatur keuangan daerah adalah peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, peraturan ini terdiri dari 18 bab dan 154 pasal. Peraturan tersebut mengacu pada peraturan yang ditetapkan sebelumnya terutama UU No. 32 tentang pemerintah daerah dan UU nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 32 mengamanatkan bentuk dan isi laporan keuangan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sistem akuntansi keuangan daerah (Zulharman, 2015).

### Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik (Fatmala, 2014).

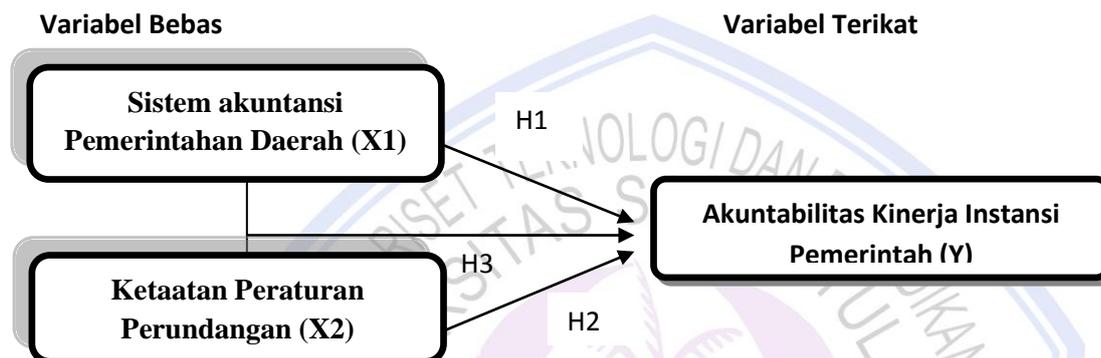
### Penelitian Terdahulu

Dina Afrina (2015) dalam penelitiannya tentang Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah , pengendalian intern dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Pekanbaru.

Mentari Cefrida.S (2014) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, akuntansi sektor publik dan ketaatan pada peraturan perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitaskinerja pemerintah sementara pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan sebaliknya.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual  
Sumber : *Kajian Teori*, 2016

### Hipotesis Penelitian

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi asosiatif yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012:55).

#### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di 35 Instansi Pemerintahan pada Kabupaten Minahasa Selatan. Periode penelitian pengamatan untuk hasil penelitian adalah 2 bulan.

#### Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Populasi. Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dan tidak menggunakan sampel.

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sanusi (2012:104) yang menyatakan bahwa : “Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yang diteliti”. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner.

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:53 ).

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Secara umum suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 ( Ghozali, 2013:47).

### Analisis Regresi Linear Berganda

Ghozali (2011:13), regresi linear berganda yaitu menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk mengetahui bentuk hubungan yang disebabkan oleh dua variabel dependen ( $X_1$  ,  $X_2$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ) , maka digunakan metode analisis regresi berganda. Model persamaan analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan melakukan analisis grafik normal *probability plot* dan grafik histogram (Ghozali,2011:163).

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Cara untuk mendeteksi adanya multikoloniaritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2013:160).

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* (Ghozali, 2011: 139).

### Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) (Ghozali, 2011: 66).

### Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) (Ghozali, 2011: 66).

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan satu. Nilai koefisien determinasi kecil,

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2013:83).

## Definisi Operasional dan Pengukurannya

### 1. Variabel Independen

Variabel independen juga disebut dengan variabel bebas yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012:39). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi pemerintah daerah, dan ketaatan peraturan perundangan. Masing- masing variabel terdiri dari 5 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan metode skala likert, Skala ini menggunakan ukur ordinal dan diberi skor yang terdiri dari sangat setuju (ss) = 4, setuju (s) =3, tidak setuju (TS) =2 , dan sangat tidak setuju (STS) = 1.

### 2. Variabel Dependen

Variabel dependen juga disebut dengan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:39). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .Variabel ini diukur dengan 5 butir pertanyaan dengan menggunakan metode skala likert, Skala ini menggunakan ukur ordinal dan diberi skor yang terdiri dari sangat setuju (ss) = 4, setuju (s) =3, tidak setuju (TS) =2 , dan sangat tidak setuju (STS) = 1.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item pertanyaan	r Tabel	r Hasil	Keterangan
SAPD	1	0,338	0,799	Valid
	2	0,338	0,904	Valid
	3	0,338	0,638	Valid
	4	0,338	0,420	Valid
	5	0,338	0,912	Valid
KPP	1	0,338	0,347	Valid
	2	0,338	0,396	Valid
	3	0,338	0,606	Valid
	4	0,338	0,687	Valid
	5	0,338	0,345	Valid
AKIP	1	0,338	0,520	Valid
	2	0,338	0,417	Valid
	3	0,338	0,358	Valid
	4	0,338	0,704	Valid
	5	0,338	0,734	Valid

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui r hitung dari semua variabel (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam semua item pertanyaan adalah valid karena r hasil > dari r tabel (0,338). Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan layak digunakan sebagai indikator dari konstruk (*laten variabel*).

## Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronchbach Alpha	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,761	Reliabel
Ketaatan Peraturan Perundangan	0,659	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,677	Reliabel

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 21.0, maka dapat diketahui bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundangan, Akuntabilitas Kinerja adalah *reliable* karena memiliki nilai di atas 0,60 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel – variabel penelitian memiliki reliabilitas atau ketepatan yang tinggi untuk dijadikan variabel (konstruk) pada suatu penelitian.

## Analisis Regresi Linear

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	7,710	2,742		2,812	,008
	SAPD	,424	,097	,613	4,390	,000
	KPP	,114	,153	,104	,746	,461

a. Dependent Variable: AKIP

(Sumber: Data Olahan, 2016)

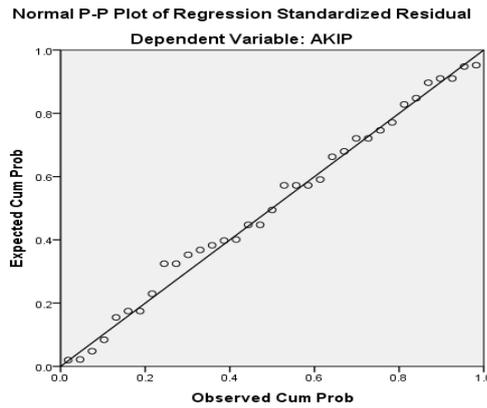
Tabel 3. Menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 7.710 + 0.424X_1 + 0.114X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan:

Tabel 3. menunjukkan untuk variabel SAPD adalah sebesar 0,424. Artinya jika SAPD mengalami kenaikan 1% maka AKIP(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,424. Untuk variabel KPP adalah sebesar 0,114. Artinya jika KPP mengalami kenaikan 1% maka AKIP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,114.

**Hasil Penelitian Uji Normalitas**



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas  
(Sumber: Data Olahan,2016)

Dengan melihat Gambar 2. grafik normal P-P plot, kita dapat melihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.

**Uji Multikolinearitas**

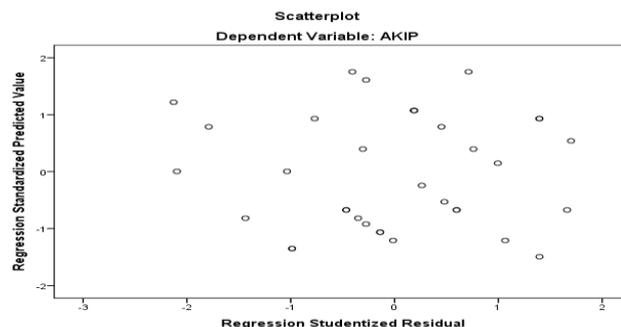
**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 SAPD	,930	1,076
KPP	,930	1,076

Dependent Variable: AKIP  
(Sumber: Data olahan,2016)

Berdasarkan hasil tersebut maka variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Perundangan dalam model regresi di atas tidak terjadi hubungan yang sempurna antar variabel (multikolinearitas) karena  $VIF < 10$  dan  $ToleranceValue > 0,1$ .

**Uji Heterokedastisitas**



Gambar 2. Diagram Scatterplot  
(Sumber: Data olahan,2016)

Berdasarkan Gambar 2. Diagram *scatterplot* diatas, Berdasarkan diagram *scatterplot* diatas, data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu, serta titik – titiknya menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heterokedasitas.

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,648 <sup>a</sup>	,420	,384	,96092	2,107

a. Predictors: (Constant), KPP, SAPD

b. Dependent Variable: AKIP

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Dari hasil perhitungan pada tabel 5. dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.384. Hal ini berarti bahwa 38,40% Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dipengaruhi oleh variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan sedangkan selebihnya 61,60% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Simultan F

**Tabel 6. Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,424	2	10,712	11,601	,000 <sup>a</sup>
	Residual	29,548	32	,923		
	Total	50,971	34			

a. Predictors: (Constant), KPP, SAPD

b. Dependent Variable: AKIP

(sumber: Data Olahan, 2016)

Berdasarkan tabel 6. menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 11.601. Besarnya nilai  $F_{tabel}$  pada  $DF_1=2$ ,  $DF_2=32$  adalah sebesar 3,29. Jadi,  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $11.601 > 3,29$ ) dengan hasil signifikansi  $< 0.05$ , hal ini berarti  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Dengan demikian rumusan hipotesis yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( $X_1$ ) dan Ketaatan Peraturan Perundangan ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja ( $Y$ ) diterima.

**Uji Parsial T****Tabel 7. Hasil Uji T**

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	7,710	2,742		2,812	,008
SAPD	,424	,097	,613	4,390	,000
KPP	,114	,153	,104	,746	,461

a. Dependent Variable: AKIP

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Tabel 7. Dapat diketahui bahwa Nilai thitung pada variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( $X_1$ ) adalah sebesar 4,390 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena t hitung lebih besar dari t tabel ( $4,390 > 2,036$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Dengan demikian dapat diartikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai thitung pada variabel Ketaatan Peraturan Perundangan ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,746 dengan tingkat signifikansi 0,461. Karena t hitung kurang dari t tabel ( $0,746 < 2,036$ ) dan nilai signifikansi  $0,461 > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Dengan demikian dapat diartikan Ketaatan Peraturan Perundangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Pembahasan****Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah**

Berdasarkan hasil perhitungan simultan dengan uji statistik simultan diperoleh nilai F hitung  $> F$  tabel ( $11,601 > 3,29$ ) dengan tingkat signifikansi  $> 0,05$  sehingga  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menandakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundangan secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian model regresi dalam penelitian ini adalah baik. Apabila Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan secara bersama-sama meningkat, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga meningkat.

**Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara statistik nilai thitung sebesar 4,390 dengan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  sehingga  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima, menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan pada masing – masing instansi pemerintah kabupaten Minahasa selatan semakin baik, maka akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan semakin meningkat.

Tujuan penerapan sistem akuntansi pemerintah adalah untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yang laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kerjanya. Jadi, dengan adanya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dapat membantu pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas kerjanya.

Hasil penelitian ini juga mendukung peneliti sebelumnya oleh Dina Afrina (2015), Zulharman (2015) serta Fatmala (2014) yang menyimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Pengaruh Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara statistik nilai t hitung sebesar 0,746 dengan nilai signifikansi  $0,461 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, menunjukkan bahwa variabel Ketaatan Peraturan Perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti sebelumnya oleh S. Cefrida (2014) yang menyimpulkan bahwa Ketaatan Peraturan Perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**PENUTUP****Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil analisa yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa selatan
2. Ketaatan Peraturan Perundangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa selatan.
3. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja yang ada di Kabupaten Minahasa selatan.

**Saran**

Berdasarkan analisa tersebut diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya agar lebih meningkatkan penerapan atas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta lebih meningkatkan dan memperhatikan efektivitas Ketaatan Peraturan Perundangan agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Minahasa Selatan akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fatmala, Juanita. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Universitas Bengkulu
- Rofika & Ardianto. 2014. Pengaruh Penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Universitas Riau.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Kedua UII Press, Yogyakarta.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi. Halaman Moeka, Djakarta.*
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Zulharman, Khodri. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pemahaman akuntansi, & ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada SKPD kota pekanbaru).

- Afrina, Dina. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Universitas Riau.
- S.Mentari, Cefrida. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Universitas Riau.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sanusi, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima) Semarang : BP .Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. 21. Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Kedua UII Press, Yogyakarta.
- Manado Terkini, 2015. <http://www.manadoterkini.com/2015/06/11456/sejarah-minsel-raih-opini-wdp-setelah-bertahun-tahun-sandang-disclaimer/>. Tanggal akses 15 mei 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*
- Suara Sulut News, 2015. <http://suarasulutnews.co.id/2015/06/13-tahun-raih-disclaimer-dan-tw-tetty-ukir-sejarah-baru-diminsel>. Tanggal akses 10 mei 2016